

## **BAB V PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Indonesia selama ini dalam membuat kebijakan luar negeri memiliki skala prioritas selayaknya negara-negara berdaulat lainnya di dunia, skala prioritas tersebut didasarkan pada lingkaran konsentris Indonesia. Berdasarkan data yang berasal dari *website* resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia yaitu, ASEAN+3 (Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok) serta Barat (Amerika Serikat dan Uni Eropa). Sedangkan, kawasan Pasifik Selatan yang jaraknya hampir sama dengan negara-negara di Asia Tenggara selama ini kerap dianggap sebagai “halaman belakang” bagi Indonesia. Kawasan tersebut kurang mendapat perhatian dari Indonesia karena kebanyakan negara di kawasan Pasifik Selatan merupakan negara-negara dengan wilayah yang kecil, dengan ekonomi yang hanya bergantung pada hasil alam dan pariwisata, serta tidak memiliki pengaruh yang kuat di dunia internasional (kecuali Australia dan Selandia Baru) sehingga kurang menguntungkan bagi Indonesia.

Kawasan Pasifik Selatan merupakan kawasan yang dihuni oleh 3 (tiga) kelompok ras, yaitu Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Dari ketiga ras tersebut, Melanesia merupakan ras yang memiliki ikatan hubungan budaya dengan masyarakat Indonesia di bagian Timur, karena menurut para ahli ras Melanesia tersebar dari Kepulauan Maluku hingga Fiji. Ras Melanesia bercirikan kulit gelap, rambut ikal/keriting, bertubuh atletis dan tengkorak kepala besar. Sehingga secara tidak langsung Indonesia memiliki 5 (lima) Provinsi yang wilayahnya dihuni oleh mayoritas Ras Melanesia, yaitu Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Barat. Selama berabad-abad wilayah yang dihuni oleh mayoritas ras Melanesia bergantian dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, wilayah tersebut mengalami dekolonisasi pada

kurun waktu 1960an-1980an dan kemudian menjadi beberapa negara merdeka, diantaranya yaitu Fiji, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, dan Vanuatu.

Namun hingga saat ini belum semua wilayah yang dihuni mayoritas oleh ras Melanesia telah mendapatkan kemerdekaan, sehingga muncul rasa solidaritas dari negara-negara Melanesia untuk membantu saudara-saudara mereka yang belum meraih kemerdekaan secara penuh. Wilayah yang mayoritas dihuni oleh Ras Melanesia yang hingga saat ini belum mendapatkan kemerdekaan penuh yaitu, Kaledonia Baru dari Perancis dan Papua (*West Papua*) dari Indonesia. Untuk memperkuat posisi mereka, maka dibentuklah organisasi sub-regional yang beranggotakan negara-negara Melanesia, yaitu *Melanesia Spearhead Group* (MSG) pada tahun 1988 di Papua Nugini. Melalui MSG negara-negara Melanesia ingin menegaskan identitas ke-Melanesiaan mereka dan memperkuat kerjasama antar negara serta sebagai wadah memperjuangkan Ras Melanesia di seluruh dunia. MSG juga menjadi bentuk kekecewaan terhadap organisasi negara-negara Pasifik yakni *Pacific Islands Forum* (PIF) karena dianggap abai terhadap isu-isu di negara Melanesia serta terlihat lebih berpihak kepada negara-negara bekas penjajah.

Dukungan dari negara-negara Melanesia anggota MSG terhadap penyelesaian isu pelanggaran HAM di Papua serta dukungan terhadap kelompok sparatis Papua membuat pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian lebih terhadap negara-negara tersebut. Apa yang dilakukan oleh negara-negara Melanesia tersebut merupakan sebuah ancaman bagi kedaulatan Indonesia, tentu saja pemerintah Indonesia tidak ingin mengulangi kisah pahit referendum Timor Timur karena isu yang sama. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hal yang telah dilakukan adalah mengirimkan delegasi Indonesia ke KTT MSG ke-18 di Fiji dan menjadikan Indonesia sebagai *observer* di MSG pada tahun 2011. Lalu Presiden SBY juga melakukan kunjungan ke Papua Nugini pada tahun 2010 untuk membahas kerjasama kedua negara, kemudian dua kali menerima kunjungan PM

Kepulauan Salomon yaitu tahun 2011 dan 2013, serta menerima kunjungan delegasi dari negara-negara Melanesia untuk melihat langsung kondisi Papua pada awal tahun 2014.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Indonesia memutuskan untuk meningkatkan lagi hubungan dengan negara-negara Melanesia, bagi Indonesia peningkatan hubungan adalah alternatif terbaik dibandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. Peningkatan hubungan menjadi pilihan yang rasional karena dengan kalkulasi yang telah dilakukan, alternatif ini dapat memberikan keuntungan lebih besar daripada kerugiannya bagi Indonesia. Peningkatan hubungan tersebut dibuktikan melalui peningkatan status Indonesia di MSG yang sebelumnya hanya berstatus sebagai *observer*, kini menjadi *associate member* sehingga membuat Indonesia lebih berpeluang untuk ikut ambil bagian dalam menentukan arah kebijakan MSG. Selain itu peningkatan juga dilakukan dibidang ekonomi dan sosial, dibuktikan dengan dilaksanakannya kerjasama teknis antara Indonesia dengan negara-negara Melanesia serta pemberian bantuan untuk penanggulangan bencana Topan kepada Fiji dan Vanuatu. Indonesia juga meningkatkan identitas ke-Melanesiaan agar dapat lebih diterima oleh masyarakat di negara-negara Melanesia dengan cara menjadi Tuan Rumah Festival Kebudayaan Melanesia di Kupang, Nusa Tenggara Timur tahun 2015 dan mendirikan Pusat Kebudayaan Melanesia di Manokwari, Papua Barat.

Isu Papua menjadi alasan utama peningkatan hubungan dengan negara-negara Melanesia, strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempersempit ruang gerak diplomasi kelompok separatis Papua ULMWP dalam upaya mereka untuk mendapatkan dukungan internasional yaitu *pertama*, menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo dalam membangun dan memajukan Papua melalui program-program strategis nasional. *Kedua*, dengan melakukan politik “Budi Baik” terhadap negara-negara Melanesia melalui bantuan-bantuan, baik bantuan berupa dana maupun bantuan teknis untuk meningkatkan Sumber Daya

Manusia (SDM). *Ketiga*, memperkuat posisi Indonesia di MSG melalui bantuan pendanaan terhadap secretariat MSG dan menawarkan kerjasama konkrit dibidang ekonomi kepada negara-negara Melanesia yang tujuannya adalah untuk mengubah fokus MSG dari politik ke ekonomi. *Keempat*, mendekatkan diri dengan negara-negara mitra dari negara-negara Melanesia, negara-negara tersebut yaitu Australia, Selandia Baru, dan Chile.

Hasil dari strategi diplomasi Indonesia tersebut yaitu Indonesia berhasil meraih dukungan dari dua negara Melanesia yang juga merupakan anggota MSG yaitu Fiji dan Papua Nugini. Kedua negara tersebut berhasil membantu upaya Indonesia untuk mencegah kelompok separatis Papua ULMWP untuk menjadi anggota tetap di MSG pada KTT ke-21 MSG di Port Moresby tahun 2018. Selain itu melalui diplomasinya Indonesia juga berhasil mempengaruhi negara-negara anggota MSG untuk menggeser fokus MSG dari politik ke ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Melanesia di kawasan Pasifik Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan dihasilkannya sebuah visi besar MSG untuk tahun 2038, yaitu *Prosperity for All* yang diawali dengan *Corporate Plan 2018-2020* sebagai langkah efektif mencapai visi MSG 2038 sebagai hasil dari KTT MSG Ke-21 di Port Moresby, Papua Nugini tahun 2018.